



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

2220112007

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER

(Muhammad Iqbal, 2220112007, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 124 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Pembangunan sebuah daerah sudah termasuk dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan arah pembangunan daerah ini termasuk dalam pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah. Untuk peluang pembangunan infrastruktur pemerintah memerlukan pengadaan barang dan jasa, pengaturan pengadaan barang dan jasa ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Dalam peluang pengadaan barang dan jasa ini pemerintah peluang proses tender, dalam pengadaan tender kadang kala munculnya sebuah persekongkolan tender. Persekongkolan tender ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 telah terjadi persekongkolan tender yang merugikan, pelaku usaha dan masyarakat. Rumusan Masalah (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa? (2) Bagaimana indikasi persekongkolan tender yang terdapat dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, untuk mendapatkan data sekunder digunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data analisis kualitatif. Hasil penelitian (1) bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022, yaitu memberikan perlindungan hak pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi dan melaporkan pelanggaran ke KPPU, serta hak masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui sanksi terhadap pelaku. (2) Indikasi yang terdapat dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 adalah terdapat indikasi bahwa beberapa peserta terlibat dalam satu kendali, yang terlihat dari kesamaan dokumen teknis yang mereka ajukan. Selain itu, adanya persekongkolan selama proses pelaksanaan dan evaluasi, antara lain, pemenang tender yang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender yang kalah. Pada tahap evaluasi dan penetapan pemenang tender, ada juga indikasi bahwa panitia cenderung memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu. Lebih lanjut, saat pengajuan sanggah, panitia tampak tidak menanggapi keluhan dari peserta tender, yang semakin memperkuat dugaan persekongkolan ini.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Perlindungan Hukum, Indikasi Persekongkolan

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES AGGRIEVED BY TENDER CONSPIRACY

*(Muhammad Iqbal, 2220112007, Master
of Law Program, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University, 124 Pages, 2024)*

ABSTRACT

A Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) includes regional development, and the direction of regional growth is included in a region's infrastructure development. To carry out government infrastructure development, goods/services must be procured; the regulation of procurement is governed by Presidential Regulation (Perpres) Number 12 of 2021 about the Procurement of Government Goods/Services. The government performs a tender process to buy these goods/services; nevertheless, a tender conspiracy occasionally arises throughout the procurement process. This tender conspiracy is governed by Article 22 of Law No. 5 of 1999, which prohibits monopolistic practices and unfair business competition. Cases 08/KPPU-L/2023 and 17/KPPU-L/2022 include a tender conspiracy that hurts the business players, and the community. Problem Formulation (1) What is the legal protection for parties harmed by tender collusion in the acquisition of goods/services? (2) What evidence of a tender conspiracy was presented during the Business Competition Supervisory Commission assembly session? Normative Juridical research methodology is employed, and secondary data is the type of data used. Primary and secondary legal documents are used as sources for secondary data, and literature reviews, interviews, and qualitative analysis are used as data gathering methods. According to the study's findings, (1) forms of protection provided to the aggrieved parties in Case Number 08/KPPU-L/2023 and Case Number 17/KPPU-L/2022, namely providing protection for the rights of business actors to demand compensation and report violations to ICC, as well as the public's right to obtain justice through sanctions against perpetrators. (2) The indication contained in Case Number 08/KPPU-L/2023 and Case Number 17/KPPU-L/2022 is the participation of several participants who are in 1 (one) control. There are similarities in technical documents. There are indications of conspiracy during the implementation and evaluation of the implementation, namely: the winner of the tender or auction subcontracts the work to another company or the tender participant who loses the tender. There are indications of conspiracy during the evaluation and determination of the tender winner, namely: the committee tends to give privileges to tender participants. There were indications of conspiracy at the time of submitting the rebuttal, namely: the committee did not respond to the rebuttal of the tender participant.

Keywords: Tender Conspiracy, Legal Protection, Indications of Conspiracy